

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001 yang telah dilaksanakan pemerintah daerah tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk membiayai semua anggaran pembangunannya. Saat ini, tidak hanya pada tataran teknis pembangunan saja yang diserahkan kepada pemerintah daerah, melainkan juga pada tahapan melakukan rencana pembangunan serta pembiayaannya. Untuk dapat melakukan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan pembangunan di wilayahnya, setiap daerah Kabupaten/Kota memerlukan penyusunan prioritas pembangunan sehingga hasil pembangunan yang optimal tercapai, karena tidak mungkin mengembangkan semua sektor secara bersamaan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya berupa : sumber daya alam, manusia, modal, dan teknologi.

Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi (Sukirno, Sadono : 2004 :16). Namun, pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan.

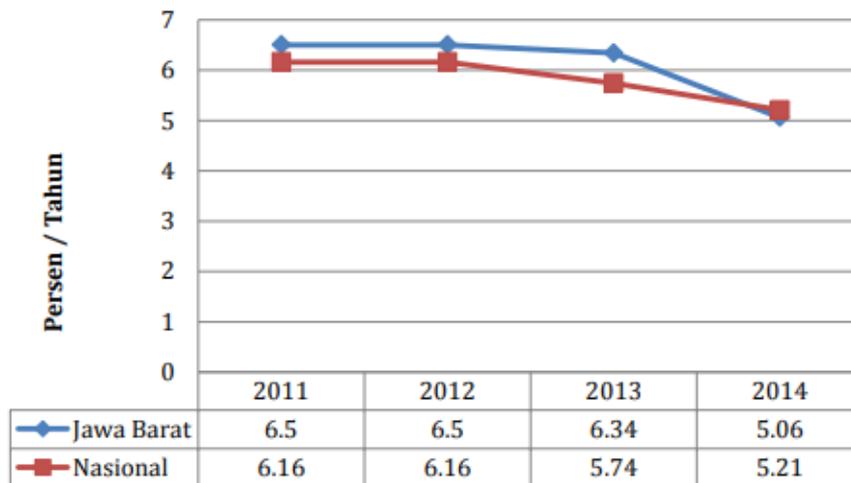
Keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan terkoordinasi antar sektor. Perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk mengukur efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan wewenang dan mengolah sumber keuangan daerah untuk mendorong dan meningkatkan proses pembangunan wilayah dan ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan suatu kerangka keterpaduan pembangunan yang berorientasi pada wilayah yang lebih luas, keterpaduan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan dan keterpaduan antara kepentingan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebutuhan informasi yang terpadu sebagai bahan untuk melihat keterkaitan antar sektor ekonomi (*interindustri relationship*) menjadi sangat penting.

Setelah adanya keterpaduan dibuatlah suatu strategi pembangunan daerah yang senantiasa ditekankan pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Dampak suatu kebijakan ekonomi lebih tepat dianalisis berdasarkan teori keseimbangan umum (*general equilibrium*) dibandingkan dengan teori keseimbangan parsial (*partial equilibrium*). Teori keseimbangan umum menjelaskan bahwa pasar sebagai suatu system terdiri dari beberapa macam pasar (pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar modal) yang saling terkait. Sebaliknya teori keseimbangan parsial hanya mengutamakan perhatiannya kepada keseimbangan di satu sektor saja. Untuk menganalisis mengenai keseimbangan umum digunakan analisis tabel Input-Output.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, baik ditinjau dari kontribusi PDB, jumlah penduduk, dan letak geografisnya. Dilihat dari sisi PDB, Jawa Barat berada di peringkat ketiga provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada periode tahun 2014-2018. Kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB nasional selama periode 2014-2018 rata-rata sebesar 14,44 persen, sedikit di bawah kontribusi PDRB DKI Jakarta (17,46 persen) dan Jawa Timur (15,20 persen).

Selanjutnya, dilihat dari sisi jumlah penduduk, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu 49.316.723 juta jiwa (BPS, 2018). Hal ini menjadi potensi yang besar, baik sebagai potensi faktor produksi (tenaga kerja) maupun potensi faktor permintaan (pasar produk). Dari sisi geografis, Jawa Barat berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang berakibat Jawa Barat memiliki fungsi sebagai daerah penyangga (*hinterland*) bagi DKI. Sebagai hinterland Jawa Barat terkena eksternalitas positif dari berbagai aktivitas yang berkembang di DKI Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi nasional yang dapat menjadi pasar, pusat keuangan dan permodalan, serta pusat pengembangan teknologi.

Kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat selama tahun 2012-2014 berfluktuatif dan memiliki kecenderungan menurun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi seama periode tersebut sebesar 6,1 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,90 persen (Gambar 1).

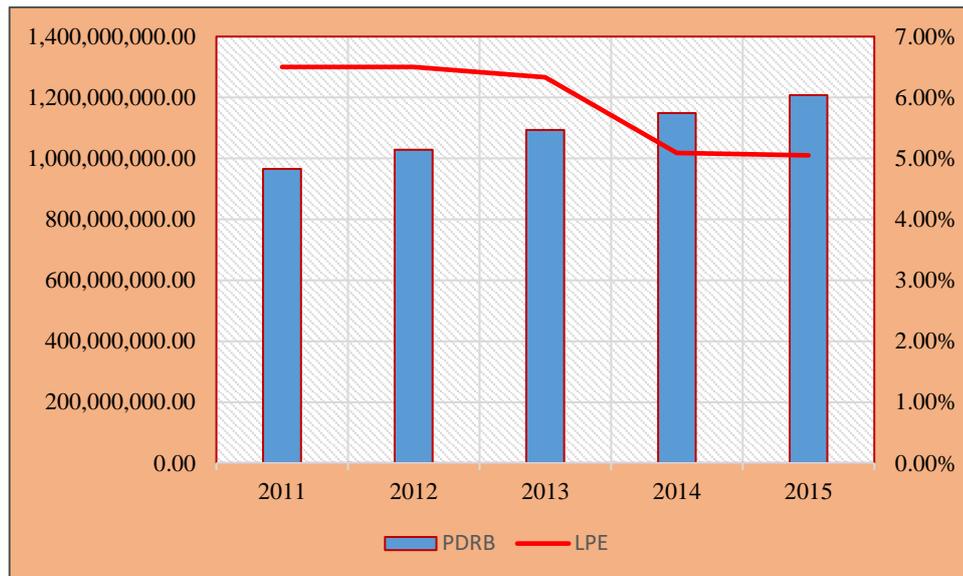


Sumber: BPS, 2014 (data diolah)

Gambar 1.1

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Atas Dasar Harga Konstan Periode Tahun 2011-2014 (%)**

Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Barat dalam periode 2011-2015 sebesar 5,89% lebih besar dari rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,52%. Pada tahun 2015, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,5%, lebih besar dari rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5.07%.



Sumber: BPS,2018 (data diolah)

Gambar 1.2
PDRB (Juta Rupiah) dan LPE (%) Provinsi Jawa Barat
ADHK 2010 Periode 2011 – 2015

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dari tahun ke tahun. Pada Gambar 1.2 menjelaskan bahwa adanya kenaikan PDRB pada setiap tahunnya, namun laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Ekonomi Jawa Barat tahun 2014 tumbuh 5,07% melambat dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 6,33%, hal ini karena perekonomian Indonesia tahun 2014 secara nasional juga mengalami perlambatan. Namun, meskipun begitu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat selalu di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional (Gambar 1.1).

Untuk memahami lebih jauh penyebab fenomena penurunan dan naiknya dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada saat ini, maka perlu dilihat bagaimana struktur ekonomi Jawa Barat. Karena adanya peningkatan PDRB Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat, dapat menjadi indikator naik atau

turunnya pertumbuhan Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun. Pada Tabel 1.1 akan menjelaskan tentang jumlah Produk Domestik Bruto Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 -2014
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

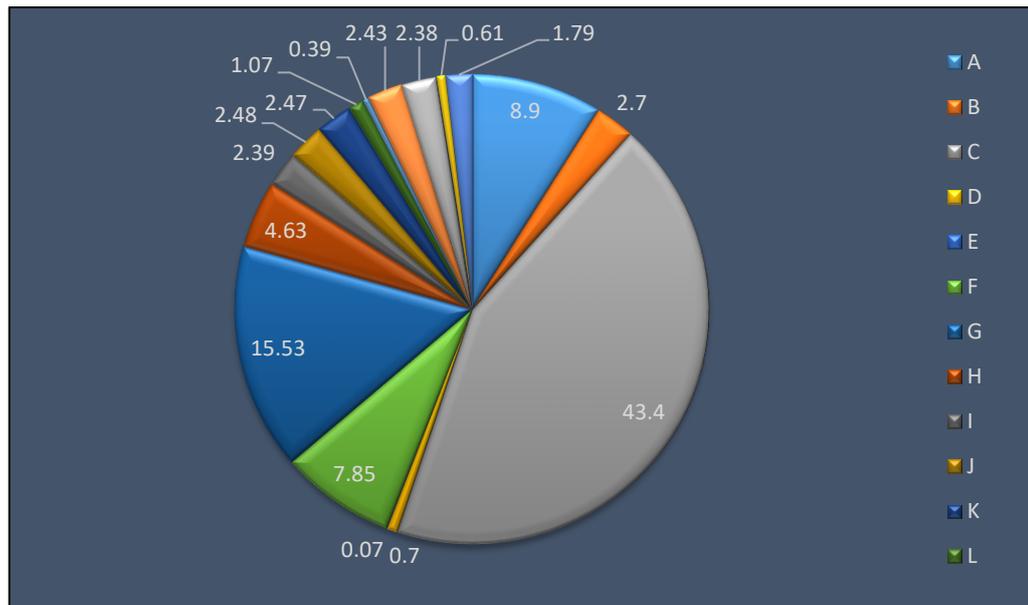
Kategori	Uraian	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Pertanian,			
A	Kehutanan dan Perikanan	100,784,620.88	114,042,321.72	120,787,231.51
B	Pertambangan dan Penggalian	36,863,496.46	34,829,948.32	33,622,738.03
C	Industri Pengolahan	487,760,807.98	544,183,777.95	604,759,573.10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,775,965.21	8,783,322.22	11,008,528.47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	837,626.98	955,503.33	1,019,667.62
F	Konstruksi	88,024,137.61	99,103,612.36	112,073,459.77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	179,461,165.06	199,720,305.33	211,469,531.52
H	Transportasi dan Pergudangan	47,419,993.47	56,700,883.10	66,392,631.77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,494,966.94	30,027,380.08	33,722,152.82
J	Informasi dan Komunikasi	27,876,566.27	30,268,188.40	34,152,993.35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	27,317,166.59	32,408,455.16	35,512,837.54

L	Real Estate	12,456,778.96	13,739,946.85	14,438,750.06
M,N	Jasa Perusahaan	4,350,495.41	4,873,091.87	5,438,669.01
	Administrasi Pemerintah,			
O	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	28,794,165.75	30,242,182.04	32,191,980.00
P	Jasa Pendidikan	25,557,787.64	29,595,982.53	35,314,726.19
	Jasa Kesehatan			
Q	dan Kegiatan Sosial	6,628,823.89	7,194,042.84	8,700,874.00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	19,841,119.52	22,320,384.69	25,218,731.73
	PDRB	1,128,245,684.62	1,258,989,328.78	1,385,825,076.49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (data diolah)

Terlihat dari besarnya kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat yang selama kurun waktu 2012 - 2014 mengalami peningkatan yaitu Rp. 1.128.245.684,62 pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.385.825.076,49 pada tahun 2014. Secara sektoral, diuraikan sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat yaitu terdapat pada sektor industri manufaktur atau pengolahan yaitu sebesar Rp. 604.759.573,10 pada tahun 2014, yang disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran yang selalu mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 211.469.531,52 pada tahun 2014.

Sedangkan, sektor yang memberikan kontribusi yang lebih rendah tetapi tetap mengalami peningkatan kontribusi terdapat pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar Rp. 1.019.66,62 pada tahun 2014. Kontribusi sektor- sektor ekonomi penyusunan PDRB Jawa Barat periode 2012-2014 dapat dilihat pada Gambar 1.2



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (data diolah)

Gambar 1.3
Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Jawa Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Periode 2012 -2014 (%)

Pada Gambar 1.3 menunjukkan suatu prestasi bagi Provinsi Jawa Barat dalam mempertahankan pertumbuhannya. Selama Periode Tahun 2012-2014 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat ialah Sektor Industri Manufaktur yaitu sebesar 43,4%. Namun selama periode tahun tersebut terlihat penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Jawa Barat, yang diimbangi dengan peningkatan kontribusi sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor konstruksi dan lainnya. Hal tersebut memberikan dorongan bagi sektor-sektor perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk lebih cepat lagi dalam memajukan sektor-sektor yang ada. Lebih dari itu, proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik (Kuncoro : 2010:27).

Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang dapat memberikan informasi, mengenai perkembangan sektor ekonomi, yang menjadi sektor unggulan, serta bagaimana dinamika atau perubahan perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat, selama kurun waktu tertentu. Sehingga informasi tersebut dapat dikelola dengan kebijakan yang tepat dan seimbang (*equilibrium*).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat telah menganalisis sebagian kriteria untuk menentukan sektor-sektor unggulan yaitu analisis keterkaitan dengan menentukan daya penyebaran, derajat kepekaan, indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan dalam matriks leontif terbuka, kriteria itu belum lengkap untuk menentukan sektor unggulan, karena daya penyebaran dan derajat kepekaan dalam analisis BPS yang disebutkan di buku Tabel I-O Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 itu adalah total output.

Kemudian, indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan dalam buku I-O Provinsi Jawa Barat tahun 2015 adalah kaitan ke belakang dan ke depan, dan belum dijelaskan pula angka-angka tersebut dalam penggambaran perekonomian. Oleh karena itu, perlu adanya gambaran perekonomian dan kelengkapan kriteria untuk menentukan sektor unggulan yaitu dengan melengkapi matriks koefisien langsung (teknologi) terbuka maupun tertutup, analisis keterkaitan, dan analisis pengganda pendapatan. Maka penelitian ini ditulis dalam judul “Analisis Keterkaitan Antar Sektor, Pengganda Output dan Pengganda Pendapatan Terhadap Sektor-sektor Unggulan (Data Empirik *Input-Output* Provinsi Jawa Barat Tahun 2015)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sektor manakah yang memberikan keterkaitan ke belakang dan ke depan menurut I-O terbuka maupun tertutup dengan menggunakan Tabel I-O Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.
2. Sektor manakah yang memberikan pengganda output tertinggi, baik menurut Tabel I-O terbuka maupun Tabel I-O tertutup dengan menggunakan data Input-Output Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.
3. Sektor manakah yang memberikan pengganda pendapatan tertinggi, baik menurut I-O terbuka dan tertutup dengan menggunakan data I-O Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.
4. Bagaimana dampak yang muncul menurut analisis tipe dampak pengganda terhadap output dan pendapatan.
5. Berapa besarnya kontribusi output setiap sektor ekonomi terhadap output secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat.
6. Berapa besarnya kontribusi Nilai Tambah Bruto setiap sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sektor yang menjadi sektor unggulan menurut analisis keterkaitan ke depan maupun ke belakang baik menurut Tabel I-O terbuka maupun tertutup di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

2. Mengetahui sektor yang memberikan pengganda output tertinggi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.
3. Mengetahui sektor yang memberikan pengganda pendapatan paling tinggi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.
4. Mengetahui dampak yang muncul menurut analisis tipe dampak pengganda terhadap output dan pendapatan.
5. Mengetahui besaran kontribusi total output setiap sektor ekonomi terhadap output secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat.
6. Mengetahui besarnya kontribusi nilai tambah bruto setiap sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat:

1. Bagi kalangan akademisi dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian lanjutan dan lebih mendalam, serta menambah khasanah penelitian ilmu ekonomi, khususnya ekonomika pembangunan, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan aplikasi tabel input output bagi pembangunan sektoral daerah.
2. Untuk lembaga pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan dan strategi yang tepat dalam rangka pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Menjadi bahan masukan yang berguna bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai sektor industri kunci yang layak dijadikan prioritas pembangunan Jawa Barat, serta informasi mengenai sumber pertumbuhan output Jawa Barat dari sisi

permintaan, sehingga dapat menjadi bahan kajian dalam pengambilan kebijakan strategi pembangunan sektoral yang tepat guna mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi daerah.

3. Bagi praktisi sebagai wahana penambah ilmu pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya tentang Tabel Input-Output dan sebagai media informasi tentang konsep Tabel Input-Output secara teoritis maupun praktis.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi penelitian ini dipilih karena Tabel Input-Output Provinsi Jawa Barat terbit tahun 2015. Sehingga belum banyak penelitian di Kabupaten Tasikmalaya yang menggunakan Tabel I-O. Dengan menggunakan tabel input-output 2015 merupakan tabel terbaru yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Barat, tabel ini masih dianggap relevan sampai 10 tahun setelah tahun dikeluarkannya selama tidak ada kejadian ekonomi yang signifikan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dimulai sejak Oktober 2019 diawali dengan pengajuan judul kepada pihak jurusan/program studi Ekonomi Pembangunan.

No.	Rencana Kegiatan	Nama Bulan																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan																				
	a. Observasi																				

	b. Identifikasi Masalah	■	■																	
	c. Penentuan Tindakan			■	■															
	d. Pengajuan Judul			■	■															
	e. Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■									
	f. Pengajuan izin penelitian					■														
2.	Pelaksanaan																			
	a. Seminar Proposal											■								
	b. Pengumpulan Data Penelitian											■	■							
3.	Penyusunan Laporan												■	■	■					
	a. Penulisan Laporan												■	■	■	■				
	b. Ujian Skripsi																			■

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Penelitian